

B A B VI

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Demokrasi Terpimpin adalah Demokrasi kekeluargaan tanpa anarkhinya liberalisme, tanpa otokrasiya diktator. Kemudian yang dimaksud Demokrasi kekeluargaan yaitu demokrasi yang berdasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuatan sentral di tangan seorang sesepuh, tertua yang tidak mendiktatori tetapi memimpin. Dalam hal ini yang menjadi pemimpin dan sesepuh adalah Presiden Soekarno.
2. Badan Konstituante yang bertugas untuk menyusun UUD baru sebagai ganti UUD 1950 mengalami kegagalan. Disebabkan karena dalam Konstituante terdapat tiga aliran ideologi, yaitu Islam, Nasionalis dan Marxisme/Sosialisme. Ketiga aliran ini masing-masing saling mempertahankan ideologinya sendiri-sendiri. Di samping itu ikut campurnya pemerintah dalam Konstituante yang mendorong untuk kembali kepada UUD 1945. Akhirnya sidang Konstituante berakhir pada tanggal 2 Juli 1959.
3. Pada masa Konstituante itu keadaan politik kurang stabil, semakin lama semakin memburuk, di daerah-daerah muncul pemberontakan-pemberontakan. Terutama di luar Jawa. Yang mencapai puncaknya pada tahun 1958 dengan munculnya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

4. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mendekretkan untuk kembali ke UUD 1945 dan sekaligus membubarkan Konstituante. Dengan dekrit itulah dimulainya sistem Demokrasi Terpimpin. Dengan Demokrasi Terpimpin itu Presiden Soekarno menempatkan dirinya sebagai figur pusat seluruh jaringan kekuasaan. Walaupun begitu masih terdapat dua pemegang kekuatan yang ikut memainkan peranan penting dalam pemerintahan yaitu PKI dan ABRI khususnya TNI-AD. Dan masing-masing saling bersaing antara satu dengan lainnya. Sedangkan partai politik lainnya khususnya partai politik Islam, sengaja dibuat oleh Presiden Soekarno untuk tidak berdaya. Adapun partai yang bersikap agresif seperti Masyumi dan PSI dibubarkan dari panggung politik Indonesia. Maka dari itu partai politik Islam lainnya seperti NU, Partindo dan PSII mengambil sikap akomodatif, sehingga mereka masih dibolehkan hidup dan dapat duduk dalam pemerintahan walaupun hanya sebagai simbolis saja; akan tetapi setidaknya mereka dapat menghalau sistem politik yang dilancarkan oleh PKI. Mereka lakukan ini semua adalah atas pertimbangan agama.
5. Demi lancarnya Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno mengambil suatu kebijaksanaan yaitu mempersatukan tiga golongan yang ada di Indonesia yaitu golongan Nasionalis, Agama dan Komunis dalam suatu wadah yang disebut NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis). Ini adalah produk Presiden Soekarno sendiri, sebab menurut Soekarno dengan adanya Nasakom ini akan memperlancar jalannya Demokrasi Terpimpin. Dalam Demokrasi Terpimpin PKI mempunyai peranan penting dalam pemerintahan, karena ia dapat duduk di sisi Presiden Soekarno dan dapat mempengaruhinya, se-

hingga Presiden Soekarno tampak lebih condong kepada PKI. Untuk mengatasi hal ini ABRI tidak tinggal diam, mereka khususnya TNI-AD berusaha untuk mengimbangi dan menghalau kekuatan PKI dengan doktrinnya yang terkenal dengan sebutan "TRI UBAYA CAKTI". Yaitu doktrin ABRI dalam rangka mempertahankan kedudukan ABRI sebagai elat Hankam.

6. Kalau kita asati, bahwa sistem pemerintahan Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin itu adalah "diktator". Hal ini terbukti setiap pidato/kebijaksanaannya merupakan penetapan yang tidak dapat ditawar lagi. Seperti Manipol Udek, NASAKOM dan lain sebagainya. Dan lembaga Konstitutif seperti MPRS, DPR-GR, Dewan Nasional dan sebagainya. Yang jelas semua kekuasaan berada di tangan Soekarno sendiri.

B. Penutup

Berkat rahmat Allah swt., yang telah dilimpahkan pada penyusun, sehingga penulisan skripsi yang sederhana ini bisa terselesaikan. Rahmat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. yang telah merubah jaman jahiliyah yang penuh kegelapan menjadi jaman yang terang-benderang yang berupa agama Islam.

Kekurangan dan kesalahan yang ada dalam skripsi ini adalah semata-mata dari ketidakmampuan penulis, lantaran keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu diharapkan bagi para pembaca untuk memberikan kritikan dan saran yang positif serta konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Tulisan yang disusun secara ilmiah(skripsi)

ini dengan judul "PARTAI POLITIK ISLAM DALAM ERA DEMOKRASI TERPIMPIN" diharapkan bisa memberikan informasi dan keterangan kepada para pecinta ilmu pengetahuan, khususnya mahasiswa Islam. Setidak-tidaknya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memperjuangkan Islam di masa Orde Baru ini.

Hanya do'alah yang dapat kami panjatkan kehadirat Allah swt., semoga karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Akhirnya wabillahiitaufig wal hidayah warridla wal insyah.